



**ANALISIS DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
FASE III TAHUN ANGGARAN 2006 DI DESA SUKOWIRYO
KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER**

*(THE IMPACTS ANALYSIS OF 2006 FISCAL YEAR DISTRICT
DEVELOPMENT PROGRAMME 3rd PHASE IN DESA SUKOWIRYO
KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER)*

SKRIPSI

Oleh:

RISA IVONE
030910201242

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PERSEMBAHAN ..	ii
HALAMAN MOTTO ..	iii
HALAMAN PERNYATAAN ..	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN ..	vi
KATA PENGANTAR ..	vii
RINGKASAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR ..	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB. 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah ..	18
1.3 Tujuan Penelitian ..	20
1.4 Manfaat Penelitian ..	20
BAB. 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pendahuluan.....	21
2.1.1. Masalah publik.....	21
2.1.2. Kemiskinan sebagai Masalah Publik ..	22
2.1.3. Evaluasi dan Efektivitas Manajemen Publik ..	23
2.1.4. Evaluasi.....	25
2.1.5. Pengertian Dampak.....	32
2.1.6. Pembangunan Lembaga ..	37
2.1.7. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ..	42
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu.....	48

BAB. 3. METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian.....	49
3.1.1. Objek Penelitian.....	49
3.1.2. Sumber dan Jenis Data	49
3.1.3. Penentuan Informan.....	50
3.1.4. Penentuan Lokasi Penelitian.....	51
3.1.5. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.1.6. Metode Analisis Data.....	53
3.1.7. Definisi Operasional	54
BAB. 4. PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Daerah Penelitian	57
4.1.1. Gambaran Umum Desa Sukowiryo	57
4.2. Realisasi dan Hasil PPK III pada Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember	62
4.2.1. Perencanaan Kegiatan.....	63
4.2.2. Pelaksanaan Kegiatan	75
4.2.3. Pelestarian Kegiatan.....	81
4.3. Dampak Sosial dan Dampak tujuh prioritas PPK.....	82
4.3.1. Dampak Sosial	82
4.3.1.1. Manfaat PPK menurut Informan	82
4.3.1.2. Kepercayaan diri peserta program untuk berpendapat dan keterlibatan masyarakat miskin dalam tiap tahapan kegiatan..	85
4.3.1.3. Dampak PPK menurut gender.....	88
4.3.1.4. Ketergantungan masyarakat terhadap PPK	91
4.3.1.5. Kenyamanan masyarakat terhadap PPK atas sarana Prasarana yang terealisasi.....	93
4.3.2. Dampak Tujuh Prioritas PPK.....	95
4.3.2.1. Bidang Sarana prasarana Infrastruktur.....	96
4.3.2.2. Bidang Pendidikan	100

4.3.2.3.	Bidang Kesehatan.....	103
4.3.2.4.	Bidang Pertanian	105
4.3.2.5.	Bidang Ekonomi.....	107
BAB. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		
5.1.	Kesimpulan	112
5.2.	Rekomendasi.....	113
DAFTAR PUSTAKA .		115
LAMPIRAN		

RINGKASAN

Analisis Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase III Tahun Anggaran 2006 Di Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, Risa Ivone, 030910201242, 2007, 115 hlm. Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak sosial dan dampak tujuh prioritas program PPK. Dari semua informan yang peneliti wawancarai mayoritas mengatakan bahwa mereka tidak tergantung dengan program PPK karena bagi mereka dana bantuan PPK itu sebagai stimulant saja dan tidak selamanya program itu ada. Dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dana PPK ini digunakan sebagai tambahan modal usaha, yang nantinya akan terus digulirkan meskipun kegiatan PPK berakhir. Sedangkan dalam jenis kegiatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, mayoritas informan mengatakan bahwa mereka butuh program-program seperti PPK ini tapi mereka tidak tergantung, artinya dalam kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, meskipun PPK berakhir namun mereka masih bisa mengandalkan dari Dinas lain di luar program PPK misal Dinas Pekerjaan Umum (PU), sehingga mereka tidak tergantung dengan program PPK ini.

Dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Definisi Operasional yang peneliti jabarkan (lihat hal.51), maka hasil penelitian ini menunjukkan dampak sosial dan dampak tujuh prioritas PPK. Mayoritas semua informan mengatakan bahwa (1) Kepercayaan diri mereka menjadi lebih tinggi jika dibanding dengan sebelum menjadi peserta peminjam dana (khususnya para resipien SPP). (2) Peserta program berpendapat bahwa kemampuan berelasi sosial mereka menjadi meningkat. Ini disebabkan karena adanya kegiatan yang mengharuskan peserta program PPK untuk berkomunikasi dalam penyampaian informasi/pendapat. (3) Mayoritas semua informan tidak tergantung dengan adanya PPK karena bagi mereka dana bantuan PPK sebagai dana stimulant saja dan PPK tidak selamanya ada. (4) semua informan menyatakan bahwa mereka merasa nyaman dengan adanya program PPK di desa mereka.

Setelah dilakukan penelitian, peneliti juga menemukan adanya peningkatan pendapatan masyarakat meskipun tidak signifikan, hal itu terbukti dengan adanya pengurangan jumlah penduduk/keluarga miskin (lihat hal.105). Sehingga dapat disimpulkan bahwa PPK ini memberi dampak baik pada segi sosial dan tujuh prioritas PPK yang ada di desa Sukowiryo. Karena pada dasarnya program PPK ini adalah program pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan menganggulangi kemiskinan.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara baru berkembang pada umumnya melakukan atau sedang dalam proses perubahan sosial yang besar, yang mengandung usaha untuk memperbaiki diri. Dalam kerangka tersebut suatu negara mendeklarasikan bahwa negaranya sedang melakukan pembangunan. Katz (Tjokroamidjojo,1995:25) menegaskan bahwa pembangunan adalah suatu perubahan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik (lebih diinginkan). Salah satu kondisi yang akan diperbaiki oleh suatu negara adalah kemiskinan yang dihadapi penduduk baik oleh karena perlakuan penindasan struktural yang telah dijalankan pemerintahan, alam, ataupun keterbatasan kesempatan penduduk untuk berkembang (akses) dengan sewajarnya. Pembahasan kemiskinan penduduk itu sendiri akhirnya dihadapkan pada konstruksi pengertian dan penyebabnya.

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lain. Kemiskinan ditandai dengan keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran yang kemudian menjadi ketimpangan antar daerah, antar sektor dan golongan penduduk. Seperti halnya dengan pengukuran dan penentuan garis batas kemiskinan yang sangat banyak terjadi di lapangan.

Secara general kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup layak. Menurut Sumodiningrat (1999:26), terdapat tiga pengertian kemiskinan yaitu :

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena asal memang miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia lainnya sehingga mereka tidak ikut dalam pembangunan.

Kemiskinan absolut adalah miskin karena tingkat pendapatan tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yang digambarkan dengan garis kemiskinan tersebut. Kebutuhan hidup minimum ini antara lain diukur dengan kebutuhan

sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup.

Kemiskinan struktural (buatan) adalah keadaan miskin yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, budayanya, dimana mereka sudah merasa cukup dan tidak kekurangan.

Sedang menurut Dewanta (1995:1), bahwa kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya peningkatan taraf hidup. Dewanta (1995:5), juga mendefinisikan penyebab yang menjadi miskin, antara lain :

1. Karena perbedaan akses ekonomi yang dimiliki.
2. Ketidakberuntungan (*bad luck*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin.
3. Adanya ketimpangan distribusi yang tidak merata.
4. Strategi pembangunan dan industrialisasi.
5. Pembangunan analog sebagai ideologi.
6. Intervensi pemerintah.

Pengukuran dan penentuan garis kemiskinan mengalami kesulitan dan muncul fenomena kemiskinan yang diobjektifkan dalam bentuk angka-angka. Sehingga, tidak mudah untuk menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari garis batas kemiskinan. Jadi kemiskinan tidak menyangkut persoalan-persoalan kuantitatif tetapi juga kualitatif. Sebab di dalam masyarakat kadang ada orang yang secara kuantitatif atau obyektif (apabila dihitung pendapatannya dengan rupiah) tergolong miskin, tetapi karena tinggal dalam lingkup budaya tertentu orang tersebut merasa tidak miskin. Bahkan cukup dan berterima kasih pada nasibnya. Hal ini terkait dengan nilai-nilai budaya seperti *nerimo ing pandum*, takdir.

Potret kemiskinan di Indonesia sesungguhnya akan lebih buram lagi, jika pengukuran kemiskinan menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*) yang lain,

yang lebih “manusiawi”. Alat ukur yang digunakan saat ini berdasarkan konsep kemiskinan absolut yang lebih menekankan pemenuhan kebutuhan makanan, yaitu sejumlah rupiah yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat membeli makanan setara 2100 kalori per hari per orang plus kebutuhan dasar non-makanan atau setara Rp.150.000 per orang per bulan. Kebutuhan non-makanan seperti pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan transportasi serta aneka barang dan jasa lain yang belum diperhatikan secara memadai dalam indikator yang sering digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) itu. Dan alternatif lain tetapi masih sama mengukur kemiskinan dengan pendekatan absolut yaitu memperhitungkan standart kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang miskin, yakni *golongan paling miskin* dengan pendapatan per kapita per tahun beras kurang dari 240 kg, *golongan miskin sekali* dengan pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 kg-360 kg dan *lapisan miskin* dengan pendapatan beras per kapita per tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg.

Dalam Proenas 2000-2004 (2001:54) sebagaimana dikutip oleh Santoso (2003:1) dikemukakan bahwa ada dua strategi utama yang digunakan Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan adalah Pertama, melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok serta melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat krisis ekonomi. Kedua, melakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural melalui pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk melakukan usaha.

Menurut Tjokrowinoto (dalam Nugroho,1993:34) bahwa problema kemiskinan bersifat multidimensional yaitu pemberdayaan masyarakat miskin. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Tjokrowinoto, Moeljanto: 1993) antara lain :

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan tersebut bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial-

politis. Langkah konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial-politis dimana orang miskin tersebut tinggal.

2. Upaya memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin untuk melakukan reorganisasi dalam meningkatkan produktifitas kerja dan kualitas hidupnya dengan mempermudah lapisan sosial seperti pendidikan, kesehatan, KB dan lain-lain.
3. Menanamkan rasa keamanan (*egalitarian*) dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial. Artinya Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan sama. Kemiskinan dan ketimpangan bukan produk Tuhan tetapi produk masyarakat itu sendiri (*the social construction*).
4. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, khususnya pembangunan perekonomian, pertanian, penyediaan fasilitas kredit untuk masyarakat lapisan bawah.
5. Pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin terhadap perubahan struktur yang diperlukan dan perubahan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, dan kepuasan hidup.
6. Diperlukannya redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata.

Kesadaran pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah sejak tahun 1993 dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan (yang sekarang digantikan oleh Keputusan Presiden No.124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan). Salah satu penjabarannya adalah program IDT. Namun program ini merupakan program yang tindakannya masih bersifat penyelamatan (*rescue*), belum sampai tahap pemulihan (*recovery*), apalagi pada tahapan pengembangan (*development*). Oleh karena itu diperlukan pengembangan pendekatan yang mengarah pada pemulihan serta pengembangan yang menempatkan manusia sebagai subyek dan titik sentral pembangunan, sehingga manusia menjadi sasaran dan diberdayakan untuk menjadi

pelaku yang makin aktif dan dinamis dalam sebuah yang disebut pelaku penting keberhasilan program itu sendiri (*people centered*) dan jika pemerintah terlibat maka keterlibatannya tidak sedalam seperti orde baru yang banyak mendominasi peran masyarakat baik pada tingkat pengambilan keputusan sampai pelaksanaan dan evaluasi.

Apalagi seperti yang dikemukakan Jelitek dan Rustanto (1999), di harian Kompas, mengemukakan bahwa program yang bertujuan untuk meringankan beban hidup rakyat miskin dalam praktiknya ternyata menimbulkan perpecahan diantara masyarakat lebih jauh lagi, program-programnya tersebut ditengarai dapat merusak daya kreasi, inovasi, kerjasama, semangat kerja masyarakat untuk bangkit. Dalam tulisannya, kedua pakar menemukan adanya dana-dana program yang diselewengkan (dalam Mashoed, 2004:37). Penelitian Ikhsan Samoan (1997) dalam Santoso (2003:2) juga membuktikan bahwa sebagian besar dana IDT (86 %) justru diterima oleh bukan keluarga miskin.

Maka dari itu perlu adanya sinergi antara pengentasan kemiskinan jangka pendek dengan jangka menengah yang saling mendukung. Seperti yang tertera dalam Propenas, bahwa program pengentasan kemiskinan di titikberatkan pada dua hal, Yaitu melalui *charity program* (bantuan cuma-cuma/belas kasihan) dan diperkuat melalui program pemberdayaan yang menggunakan paradigma "*people centered*".

Salah satu program pemberdayaan yang muncul dalam paradigma *people centered*, salah satunya adalah pemberdayaan sumber daya lokal. Menurut Tjokrowinoto (1996:219-220), Pengelolaan sumber daya lokal merupakan sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pengelolaan sumber daya lokal merupakan mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi *social learning* dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasi diri mereka (*empowerment*).

Menurut Sumodiningrat (1999:19) dalam Mashoed (2004:40), mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan adalah, *pertama*, bantuan dana sebagai modal usaha. *Kedua*, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi masyarakat. *Ketiga*, penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat. *Keempat*, pelatihan bagi aparat dan masyarakat. *Kelima*, penguatan kelembagaan sosial, ekonomi masyarakat.

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi tidak serta merta mengurangi kemiskinan itu sendiri. Ada beberapa alasan yang mungkin dapat diutarakan mengenai masalah tersebut. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Haryono Suyono mantan Menko Kesra dan Taskin yang dirasa kurang meyakinkan karena dua hal. *Pertama*, program yang dibuat memang bukan dimaksudkan sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan, namun hanya sebagai alat pelindung social. Kebijakan yang diberlakukan tidak memprediksi pola jangka panjang guna merangsang pertumbuhan. Artinya, program pengentasan kemiskinan tersebut hanya mempunyai efek jangka pendek dan tidak bisa meng-*cover* atau menggantikan program jangka panjang. *Kedua*, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tidak selalu bebas dari hambatan-hambatan politis. Hal ini terlihat, sasaran yang mestinya diarahkan pada penduduk dan keluarga miskin, dalam praktik seringkali jatuh pada kelompok masyarakat yang vokal tetapi tidak selalu miskin yang semula direncanakan (*Mal Administration*). Bisa diduga, hasilnya pun tidak membawa manfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan (Raharjo dan Hindarmanto,1998 dalam Mashoed,2004:37).

Hal senada seperti pada laporan penelitian Gumilar Rusliwa Soemantri (1999) dalam Mashoed (2003:38) menyatakan bahwa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti program JPS (Jaring Pengentasan Kemiskinan) yang terlalu menekankan target dan cuma bertujuan jangka pendek, hanyalah menghabiskan dana. Terbukti, penekanan target dan tujuan yang hanya jangka pendek merupakan salah satu penyebab utama dari kegagalan program pengentasan kemiskinan. Program

dengan model tersebut tidak mendidik, mengajarkan ketergantungan dan menebar bibit baru untuk menyalahgunakan uang rakyat. Bahkan seperti diberitakan diberbagai media massa, Bank Dunia sempat mengecam menghentikan kucuran dana program tersebut (*Kompas*, 3 Maret 1999). Bahkan, di Jatim terungkap bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jatim ternyata justru meningkat menjadi 20,34% (7,1 juta jiwa). Padahal Imam Utomo mulai memimpin Jatim persentase angka kemiskinan tercatat hanya 19,53% (6,8 juta jiwa). Padahal penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas provinsi Jatim, tetapi selama Lima tahun dibawah era kepemimpinan Imam Utomo kemiskinan justru semakin meningkat jumlahnya (*Kompas*, 27 Mei 2003).

Kalau mau jujur, kelemahan dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan adalah :

1. Kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro.
2. Kebijakan yang sifatnya sentralistik/terpusat sehingga tidak peka pada kebutuhan lokal.
3. Bersifat karikatif, cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek.
4. Memandang kemiskinan hanya dari aspek ekonomi saja.
5. Permasalahan kemiskinan di berbagai daerah dan komunitas dianggap serba sama. (*Kompas*, 2 Juni 2003).

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak seharusnya terbatas pada pengadaan dan alokasi asset, pelayanan sosial dan peningkatan pendapatan. Akan tetapi juga peningkatan *self respect*, kemandirian dan peluang untuk melakukan mobilitas sosial dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dan salah satu program yang merupakan penjabaran dari kebijakan pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dapat dikategorikan sebagai pandangan pendekatan pembangunan yang berpusat pada sumber daya manusia adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PPK dapat dikatakan merupakan tindakan kebijakan yang berhaluan ke arah pemberian wahana

pengembangan potensi dasar manusia yang ada di desa-desa karena ketidakmampuan dalam menerima situasi di luar dirinya. PPK ini merupakan kelanjutan dari program IDT berdasar Inpres No.5 Tahun 1993 yang telah dimulai sejak tahun anggaran 1998/1999 dan berakhir pada tahun 2001. Dimana Inpres tersebut telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden No.124 tahun 2001 yang menjadi dasar normatif dalam program PPK sampai sekarang ini dan yang menandakan bahwa Keppres itu mengacu pada program PPK tertera pada pasal 4 dan poin d bahwa PPK merupakan penjabaran dari kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan mereka sebagai pelaku utama pembangunan (*people centered*).

Secara umum tujuan PPK ialah mengentaskan kemiskinan berdasar pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus PPK adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.
- b. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan
- c. Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan
- d. Mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatoris
- e. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui PPK, masyarakat dan aparat pemerintah di dorong untuk bersifat terbuka dalam proses pembangunan. Masyarakat terus didorong dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri, termasuk menentukan sendiri kegiatan perkembangan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya. Dilain pihak, pemerintah juga didorong untuk lebih berfungsi sebagai fasilitator dan bukan sebagai penentu kebijakan secara sepihak. Pemerintah daerah dan masyarakat didorong untuk belajar

bersama-sama sebagaimana merencanakan dan melaksanakan pembangunan berdasar kebutuhan nyata masyarakat dan sumber daya lokal yang tersedia.

PPK pada dasarnya sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang akan didanai. Terutama kegiatan yang menguntungkan dan yang banyak melibatkan masyarakat miskin serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Pelaksanaan PPK fase I telah dimulai sejak tahun anggaran 1998/1999 dan berakhir tahun 2001. dan PPK fase II dimulai pada tahun anggaran 2002/2003, berakhir tahun 2005. PPK fase II pada prinsipnya tidak berbeda dengan PPK fase I. Perbedaan yang ada lebih pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan serta perluasan pilihan kegiatan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Setelah PPK fase II berjalan, pemerintah pusat melanjutkan program ke PPK fase III, dengan manajemen yang agak berbeda. Pada PPK fase II manajemen operasional kelembagaan, dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan dukungan dari swadaya masyarakat. Pemerintah kabupaten dalam hal ini hanya memberikan dukungan operasional Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP).

PPK fase III yang dimulai tahun 2006 merupakan kelanjutan dari PPK fase II, dimana PPKIII terdiri dari dua tahun anggaran (2006 dan 2007), tapi penulis dalam penelitian ini meneliti satu tahun anggaran saja yaitu TA 2006 karena sesuai dengan judul yang penulis ambil tentang evaluasi (ditinjau secara teoritis), dimana program yang bisa dievaluasi hanyalah program yang sudah selesai dilaksanakan (*ex post evaluation*) dan TA 2006 di desa Sukowiryo telah selesai pelaksanaannya sedangkan untuk TA 2007 sekarang masih dalam tahap implementasi. Sedangkan ditinjau secara prakteknya/di lapangan alasan penulis memilih PPKIII TA 2006 di desa Sukowiryo adalah karena pada TA 2006 ini desa Sukowiryo mempunyai perencanaan sendiri(intern) pembangunan desanya yaitu dengan membuat Dokumen Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) Sukowiryo sebagai penerapan dari Renstra Pembangunan jangka menengah desa Sukowiryo yang merupakan hasil dari Musdes Perencanaan PPKIII TA 2006. Dimana penyusunan dokumen MMDD ini

dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan hasil penggalian gagasan di tingkat dusun dan Musdes, serta MKP dalam PPKIII ini yang difasilitasi oleh Kader Desa dibantu oleh Fasilitator Kecamatan. Karena banyak diantaranya perencanaan pembangunan di desa selama ini berjalan masih bersifat parsial, artinya bahwa perencanaan tersebut masih bersifat jangka pendek walaupun dalam perencanaannya sudah melibatkan peran serta masyarakat namun masih belum optimal karena semuanya harus mengikuti aturan proyek yang mendanai. Maka daripada itu perlu adanya pemberian kewenangan pada masyarakat untuk mengatur pembangunan desanya sendiri secara mandiri atas dasar tuntutan kebutuhan dan kemampuan dari masyarakat sendiri. Dan untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu adanya metode yang dapat dipakai sebagai alat dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini PPKIII TA 2006 menerapkan sebuah metode Renstra pembangunan dengan berbasis MMDD di desa Sukowiryo. Adapun rumusan tujuan dari MMDD di desa Sukowiryo sebagai berikut: (a) Media belajar dan peningkatan SDM bagi pelaku pembangunan di desa Sukowiryo dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif dan *suistenable*, (b) Sebagai bahan acuan kerja Pemerintah Desa Sukowiryo dalam penyelenggaraan pemerintah di desa untuk membuat Perdes. Karena itulah peneliti memilih TA 2006 yang sudah bisa untuk di evaluasi. Adapun kriteria evaluasi menurut Bryant and White (dalam Samodra Wibawa/1994:65) adalah (1) Waktu pencapaian (2) Tingkat pencapaian yang diinginkan (3) Perubahan perilaku masyarakat (4) Pelajaran yang diperoleh para pelaksana program (5) Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya. Dan dalam hal ini program PPK III memberikan nilai tambah untuk penguatan kelembagaan dan pemerintah lokal. Seiring dengan itu, peran pemerintah pusat dan konsultan mulai ditarik, yang pada gilirannya tujuan PPK adalah senantiasa menyesuaikan dengan dinamika yang sedang berkembang.

Demikian juga dengan manajemen pendanaannya. Pada PPKIII peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas memberikan dukungan operasional PAP semata, tetapi juga dituntut untuk memberikan kontribusi Bantuan Langsung